

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

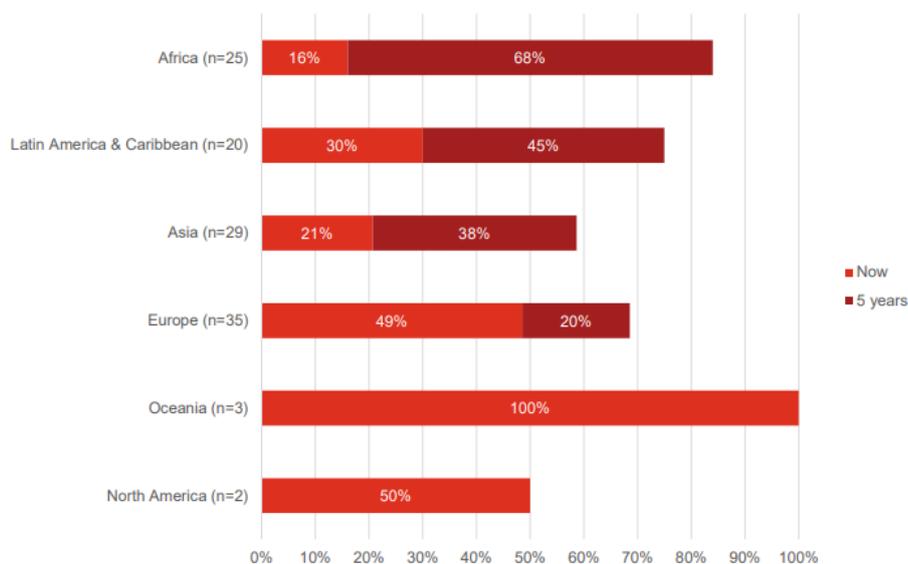
Penerapan pencatatan berbasis akrual merupakan perubahan yang terjadi di sektor publik, ditandai dengan lahirnya *New Public Management* (NPM). NPM adalah istilah yang digunakan dalam klasifikasi secara luas dan serupa dengan reformasi sektor publik. NPM pertama kali dikemukakan oleh organisasi OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) dari berbagai negara pada tahun 1970. Akuntansi berperan penting sebagai instrumen pendukung pada organisasi sektor publik untuk meningkatkan kinerja mereka (Hood, 1995). NPM menuntut pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel dan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang relevan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Dengan akuntansi akrual diyakini dapat memberikan informasi mengenai efisiensi dan efektivitas organisasi dan mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja.

Sistem akrual merupakan salah satu produk dari NPM. Penerapan akrual diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Di Indonesia reformasi akuntansi akrual ditandai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap terutama informasi piutang dan utang pemerintah. Laporan keuangan berbasis akrual memberikan manfaat dalam hal menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisien dan efektivitas dan ketaatan pada

peraturan. Akuntansi akrual juga diyakini dapat memberi pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.

Secara umum akuntansi akrual dan pelaporan sudah diterima oleh negara-negara di internasional, dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Menurut Blondal (2003, dalam Adhikari & Gårseth-Nesbakk, 2016) hal ini meyakini tentang manfaat akuntansi dan pelaporan akrual ke berbagai tingkat dan di beberapa tingkatan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah negara bagian dan lokal dan dana jaminan sosial. Menurut hasil penelitian Blondal (2015), penerapan akrual di sektor publik negara-negara yang terdaftar dalam OECD terbagi atas empat grup yaitu, pengadopsian intensitas tinggi, pengadopsian intensitas medium, pengadopsian intensitas rendah, dan pengadopsian baru. Terdapat 3 negara pengadopsi sistem akrual yang mempunyai tingkat intensitas tinggi. Negara-negara tersebut telah menerapkan sistem akrual penuh untuk menyusun laporan keuangan dan anggaran negaranya. Pengadopsian intensitas medium pada negara yang terdaftar dalam organisasi OECD berjumlah 21 negara. Pada negara-negara pengadopsian intensitas medium menerapkan sistem akrual diantara laporan keuangan dan anggaran ataupun keduanya. Kemudian untuk negara-negara pengadopsi intensitas rendah berjumlah 12 negara. Negara-negara tersebut mengikuti akuntansi berbasis kas di tingkat pusat, namun beberapa diantaranya menyediakan informasi akrual tambahan. Dan terakhir yang baru mengadopsi sistem akrual, berjumlah 3 negara. Pada Gambar 1, menunjukkan data persentase penerapan akuntansi akrual diberbagai benua di dunia:



Sumber : Price Waterhouse Cooper (PWC) Annual Report, 2015

Gambar 1. Grafik penerapan akrual berdasarkan benua

Berdasarkan gambar 1 diatas, penerapan akuntansi akrual pada tahun 2015 di Afrika 16%, Amerika Latin dan Caribbean 30%, Asia 21%, Eropa 49%, Oceania 100%, dan Amerika Utara 50%. Dan menargetkan penerapan akuntansi akrual pada 5 tahun mendatang di Afrika meningkat sebesar 68%, Amerika Latin dan Caribbean meningkat sebesar 45%, Asia meningkat sebesar 38%, dan di Eropa meningkat sebesar 20%. Sebagai tambahan PWC (2013), menemukan bahwa proporsi pemerintah yang menerapkan akuntansi akrual yang akan menerapkan IPSAS atau standar serupa dalam lima tahun kedepan meningkat dari 59% menjadi 77%.

Di Indonesia pada awal penerapannya, sistem akrual masih terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan belum memadainya sarana penunjang pengauditan. Menurut data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi kendala berupa pengakuan piutang yang masih diakui secara sistem berbasis kas dan belum lengkapnya kebijakan dalam mengatur pendapatan, beban, aset dan kewajiban pada beberapa proses bisnis Kementerian atau Lembaga dan Bendahara Umum Negara sehingga belum dapat disajikan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Selain itu, IHPS I tahun 2018 juga menunjukkan pendapatan Puskesmas Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) yang belum disajikan secara akrual, Tagihan atas sanksi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan kewajiban membayar Laporan Transfer Dana Bukan Bank (LTDBB) masih dibukukan sebagai piutang dengan basis kas, dan tidak sesuai pencatatan realisasi belanja modal yang dilakukan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) DIPA Pusat maupun daerah.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dan menurut data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, penerapan berbasis akrual di Indonesia adalah sebanyak 24 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Pada laporan keuangan tahun 2015, rata-rata skor Pemda yang menerapkan SAP akrual adalah 69,55%. Pemerintah Kota Semarang 69,64%, Pemerintah Kota Tangerang 68,90%, Pemerintah Kota Pontianak 58,82%, Pemerintah Kabupaten Banyumas 72,02%, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 71,43, Pemerintah Kabupaten Jepara 68,79%, Pemerintah Kabupaten Pandeglang 76,83%, Pemerintah Kabupaten Temanggung 69,94% (Leksono & Haryanto, 2017).

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi akrual adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM). Untuk meminimalisir kendala tersebut maka dibutuhkan pelatihan terhadap SDM, komunikasi yang baik, latar belakang pendidikan yang bermutu, dan budaya organisasi (Ouda, 2008). Sehingga dapat menyediakan SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dengan basis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Fadelelmoula (2018), suatu organisasi yang mengadopsi suatu sistem harus memperhatikan faktor pelatihan, karena pelatihan berpengaruh terhadap pengimplementasian suatu sistem. Beberapa peneliti menemukan bahwa pelatihan berguna dalam meningkatkan keterampilan pengguna akhir untuk upaya organisasi dalam mencapai tujuan manajerial dan kinerja (Ram, Corkindale, & Wu, 2013). Ini menunjukkan bahwa pelatihan dapat berkontribusi dalam pencapaian manfaat dari implementasi sistem. Menurut penelitian Aswar dan Saidin (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara program pelatihan yang memadai dan adopsi sistem akuntansi akrual. Dimana dapat diartikan bahwa pelatihan dapat mempengaruhi dalam penerapan dan implementasi akuntansi akrual. Hal ini juga sejalan dengan argumentasi Aswar dan

Saidin (2018b) bahwa pelatihan berpengaruh terhadap implementasi akuntansi akrual.

Selain daripada itu, faktor lain yang mempengaruhi implementasi akuntansi akrual adalah komunikasi. Berdasarkan penelitian Dezdar (2012), komunikasi yang terkordinasi adalah cara efisien untuk menjelaskan tujuan, jadwal, manfaat, dan populasi, dan laporan rutin kepada tingkat kecukupan yang benar-benar penting. Dalam adopsi sistem, harus disediakan saluran komunikasi yang cukup, seperti pertemuan, catatan buletin, demonstrasi dan roadshow untuk menjaga agar semua pemangku kepentingan mendapat informasi. Selain itu, komunikasi harus saling terjaga dan saling memberi informasi setiap saat untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat proyek implementasi. Salah satu faktor penyebab gagalnya implementasi suatu sistem adalah adanya kesenjangan dalam komunikasi (Al-Mashari & Al-Mudimigh, 2003; Abouzahra, 2011). Menurut penelitian Almajed & Mayhew (2013) komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilannya penerapan suatu sistem. Hal ini disarankan oleh peneliti Aswar dan Saidin (2018) dengan menambahkan variabel komunikasi. Selain itu, peneliti Garg & Garg (2014) juga merekomendasikan agar menambahkan variabel komunikasi, karena komunikasi merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi suatu sistem

Human capital theory menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktivitasnya. Pendidikan formal berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Pengetahuan akuntansi yang lebih tinggi didapatkan apabila menempuh pendidikan dengan jurusan akuntansi. Penelitian Gray (2006) menunjukkan pendidikan juga berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi dan eksploitasi) dan pengetahuan baru. Berdasarkan penelitian Eriotis, Stamatiadis dan Vasiliou (2012) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan klinis akan lebih bergantung pada bentuk manajemen formal dan hierarki sehingga akan lebih termotivasi untuk mengadopsi sistem akuntansi akrual dan menuai manfaat yang diharapkan. Tingkat adopsi reformasi akuntansi secara positif terkait dengan latar belakang pendidikan yang berorientasi bisnis. Menurut Emsley,

Nevicky dan Harisson (2006) dan Hambrick (1996) pimpinan dengan latar belakang administrasi yang dominan berpengaruh positif terhadap penerapan suatu sistem.

Budaya organisasi dapat menentukan apakah penerapan suatu sistem dapat berhasil atau tidak. Menurut penelitian sebelumnya Annamalai dan Ramayah (2013) budaya organisasi juga memiliki implikasi pada penerapan sistem. Budaya organisasi mencakup istilah-istilah seperti nilai, tradisi, kebijakan, prinsip bisnis, keyakinan dan keyakinan karyawan tentang sistem bisnis. Pada penelitian (Aswar & Saidin, 2018) menggunakan variabel moderasi untuk mengukur hubungan antara dukungan manajemen puncak, program pelatihan yang memadai dan kualitas teknologi informasi terhadap adopsi akuntansi akrual.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur-literatur yang berkaitan dengan variabel pelatihan, komunikasi, latar belakang pendidikan, budaya organisasi sebagai variabel moderasi, dan implementasi akuntansi akrual. Penelitian Fadelelmoula (2018) menggunakan variabel dukungan manajemen puncak, pelatihan proyek manajemen, sumber daya teknis, rekayasa ulang proses bisnis dan dukungan konsultan tetapi tidak mempertimbangkan efek komunikasi dan latar belakang pendidikan. Kemudian pada penelitian Dezdar dan Ainin (2011) menggunakan variabel manajemen proyek, komposisi dan kompetensi tim, dan rekayasa ulang proses bisnis tetapi tidak mempertimbangkan efek pelatihan pada penelitiannya. Penelitian ini menambahkan variabel komunikasi sesuai rekomendasi (Aswar & Saidin, 2018; Garg & Garg, 2014).

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi akuntansi akrual di pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengungkapkan hubungan antara pelatihan, komunikasi dan latar belakang pendidikan terhadap implementasi akuntansi akrual di Pemerintah Daerah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah?
- 2) Apakah komunikasi berpengaruh positif terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah?
- 3) Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah?
- 4) Apakah budaya organisasi dapat memoderasi hubungan antara pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah?
- 5) Apakah budaya organisasi dapat memoderasi hubungan antara komunikasi terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah?
- 6) Apakah budaya organisasi dapat memoderasi hubungan antara latar belakang pendidikan terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada Perumusan Masalah yang sudah ditentukan adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah
- 2) Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah
- 3) Mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah
- 4) Mengetahui efek moderasi budaya organisasi pada pengaruh pelatihan terhadap penerapan sistem akuntansi akrual di Pemerintah Daerah

- 5) Mengetahui efek moderasi budaya organisasi pada pengaruh komunikasi terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah
- 6) Mengetahui efek moderasi budaya organisasi pada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap implementasi sistem akuntansi akrual di pemerintah daerah

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat kepada berbagai pihak diantaranya adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelatihan, komunikasi, latar belakang pendidikan, budaya organisasi dan implementasi sistem akuntansi akrual di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel komunikasi atas dasar rekomendasi (Aswar & Saidin, 2018; Garg & Garg, 2014).

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat Umum

Diharapkan mampu memberikan input dalam melaksanakan suatu kebijakan khususnya Standar Akuntansi Pemerintah serta memberikan informasi mengenai kendala-kendala dan solusi yang mempengaruhi implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan tata kelola sektor publik dan dapat berfungsi sebagai masukan bagi publik dalam membuat kebijakan dan memastikan implementasi penuh pada Pemerintah Daerah.

c. Peneliti Selanjutnya

Untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.